
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 8	1
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KE- KUASAAN KEHAKIMAN, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4358	16
II. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, LEMBAR- AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 73	27
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3316	54
III. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9	71

<p>IV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98</p>	95
<p>V. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4316</p>	124
<p>VI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 20</p>	141
<p>VII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3327</p>	162
<p>VIII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34</p>	175
<p>IX. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4379</p>	193
<p>X. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77</p>	203
<p>XI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3344</p>	251
<p>XII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35</p>	297
<p>XIII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380</p>	316
<p>XIV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 49</p>	331
<p>XV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3400</p>	362
<p>XVI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 84</p>	383

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3713 521

XI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3 613

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3668 635

XII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208 653

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4026 674

XIII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27 689

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4189 728

XIV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49 747

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4288 763

XV. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 67 773

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4401 789

XVI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2 805

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168 825

XVII. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138 847

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872 875
